

BAB III

PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)

3.1 Sejarah Partai Beringin Karya (Berkarya)

Asal mula partai berkarya ternyata memiliki keterkaitan dengan partai golongan karya (golkar). Berdirinya partai berkarya merupakan bentuk pembaruan politik karena berusaha menegaskan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh partai golkar dimasa lalu. Pada tahun 2014 terjadi konflik di internal partai golkar dalam memperebutkan kekuasaan ketua umum partai.

“Pada tahun 2014, terjadi konflik internal di Partai Golkar antara faksi Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, yang berakhir dengan penyelesaian secara islah (perdamaian) berkat peran Jusuf Kalla, meskipun menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kader. Beberapa kader, termasuk Badaruddin Andi Picunang, keluar dan membentuk partai baru dengan slogan "Golkar Perjuangan", namun terhambat oleh aturan hukum yang melarang penggunaan nama atau simbol partai yang sudah ada...”(wawancara, 3 Januari 2024).

Melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan, Tommy Soeharto bersama para pendiri partai berkarya lainnya, termasuk Badaruddin Andi Picunang memilih menggunakan simbol pohon beringin dan warna kuning sebagai logo identitas partai. Nama "beringin karya" yang kemudian disederhanakan menjadi "berkarya" sebagai nama resmi partai, sehingga berdirilah embrio partai berkarya pada 2 Mei 2016. Guna memenuhi persyaratan keabsahan partai secara legal hukum, setiap partai baru diwajibkan mempunyai badan hukum yang diakui negara. Partai berkarya saat itu belum memiliki badan hukum memilih jalur mengakuisisi badan hukum partai lain daripada mengurus dari awal. Untuk mendapatkan badan hukum partai baru harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti tersedianya 100 persen pengurus di Provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen di kecamatan, beserta data pengurus,

domisili, dan kantor sekretariat untuk diverifikasi oleh kemenkumham (Ridwanata 2021, 70).

Pada akhir Juli 2016, dua partai yang terbilang baru merintis karier politik, yaitu Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya, melakukan fusi. Partai Nasional Republik, yang dipimpin oleh sekretaris Neneng A. Tuti dengan Tommy Soeharto sebagai ketua dewan pembina dan Muchdi Purwopranjono sebagai wakil ketua, memilih badan hukum milik partai Nasional Republik untuk diakuisisi. Hasil fusi ini membentuk kesatuan partai Beringin Karya atau Berkarya (Ridwanata 2021, 70).

Partai beringin karya atau disingkat partai berkarya merupakan fusi dari dua partai politik yakni partai beringin karya dan partai nasional republik. Partai berkarya didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016 dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016 setelah menteri hukum dan hak asasi manusia Yasonna Laoly mengeluarkan SK Menhumham No. M. HH-21. AH. 11. 01 Tahun 2016 (Partai Berkarya, 2017).

Partai berkarya merupakan partai yang didirikan oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra bungsu dari mantan presiden republik Indonesia ke dua Soeharto yang menjabat sebagai ketua majelis tinggi dan dewan pembina partai berkarya, sekjen partai berkarya adalah Badaruddin Andi Picunang dengan ketua umum pertama Neneng Anjarwaty Tuti (periode 2016-2018). Sebelumnya Neneng menjabat sebagai ketua umum partai nasrep. Partai berkarya menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke- III di Solo, Jawa Tengah tepatnya di Lor In Hotel Karanganyar pada 10 Maret 2018 hingga 13 Maret 2018 yang diikuti oleh seluruh dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) se-Indonesia (Hartoni 2021, 44).

Dalam agenda rapimnas ke-III adalah mengangkat Tommy Soeharto menjadi ketua umum. Keputusan tersebut dilakukan setelah

mendengar suara dari seluruh pengurus daerah yang meminta Tommy Soeharto menjadi ketua umum berkarya. Pengangkatan Tommy sebagai ketua umum berlangsung secara aklamasi dikarenakan seluruh kader pengurus kabupaten, provinsi seluruh Indonesia menginginkan Tommy Soeharto menjadi ketua umum. Tommy Soeharto resmi ditetapkan menjadi ketua umum partai berkarya periode 2017-2022 sesuai dengan SK Menkumham tahun 2017. Keputusan diambil setelah mendengarkan pandangan dari 34 dewan pimpinan wilayah partai berkarya seluruh Indonesia (Hartoni 2021, 45).

Pengangkatan Tommy Soeharto tercatat dalam keputusan rapimnas ke-III partai berkarya Nomor 07/Keputusan/Rapimnas III Partai Berkarya/3/ 2018. Rangkaian verifikasi partai politik dilakukan sejak 2017 hingga pada tanggal 9 Februari 2018 partai berkarya ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai satu dari 4 (empat) partai baru dari 16 (enam belas) partai politik yang berhak mengikuti pemilihan legislatif 2019 (Hartoni 2021, 46)

Dari sejarah Partai Berkarya yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa faktor utama berdirinya partai ini disebabkan oleh konflik internal di Partai Golkar, yakni ketidakpuasan sejumlah kader partai Golkar yang merasa kecewa dari hasil penyelesaian konflik internal. Tokoh yang merasa kecewa dengan hasil penyelesaian konflik internal tersebut adalah Badaruddin Andi Picunang dari kubu Agung Laksono, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris jenderal partai berkarya yang memutuskan untuk keluar dari partai Golkar setelah merasa perjuangannya sia-sia. Kemudian didirikanlah partai beringin karya yang merupakan gabungan dari dua partai politik yakni partai beringin karya dan partai nasional republik.

3.2 Visi dan Misi Partai Beringin Karya

3.2.1 Visi Partai Beringin Karya

Kata visi berasal dari bahasa Inggris yaitu *vision* yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Secara etimologi, visi diartikan sebagai persepsi yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan dicapai. Visi adalah sekumpulan kata bahkan kalimat yang menggambarkan mimpi, aspirasi, rencana, harapan untuk masa depan asosiasi, perusahaan, dan organisasi. Visi juga dapat digambarkan sebagai apa yang benar-benar dibutuhkan suatu organisasi untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang suatu organisasi. Dengan kata lain, visi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang “diinginkan” oleh suatu asosiasi, perusahaan, atau organisasi (Ahmad 2016, 15).

Bagi partai politik, visi adalah konsep moral yang menggambarkan profil partai masa depan yang diinginkan. Visi masa depan ini selalu dibentuk oleh peluang dan tantangan yang diharapkan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, partai politik perlu mempertimbangkan perkembangan dan tantangan ke depan dalam menetapkan visinya (Faruq & Supriyanto, 2020).

Visi partai politik adalah gambaran atau arah yang ingin dicapai oleh partai politik untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan. Dengan mencakup nilai-nilai, prinsip, dan tujuan besar yang menjadi landasan dalam menjalankan program-program politik dan kebijakan, dan menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan politik partai untuk mencapai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang diinginkan.

Adapun visi partai berkarya adalah “Partai Beringin Karya bersama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang

maha esa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, dalam negara kesatuan republik Indonesia” (Partai Berkarya, 2017). Visi partai berkarya ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar negara, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi ini mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa yang melibatkan kehidupan beragama, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, penekanan pada kerja sama dengan masyarakat luas menunjukkan bahwa partai ini menginginkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan negara.

3.2.2 Misi Partai Beringin Karya

Misi adalah penyempurnaan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan lembaga atau organisasi untuk mewujudkan visinya. Misi juga merupakan sesuatu yang konkrit untuk dituju dan juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mencapai visi tersebut (Anisa Rahmatullah 2020, 356).

Misi partai politik adalah merujuk pada langkah-langkah yang akan diambil oleh partai untuk mewujudkan visi dan tujuan jangka panjangnya. Misi ini menjelaskan bagaimana partai politik itu akan mencapai tujuan-tujuannya, termasuk melalui kebijakan, program, dan strategi tertentu. Misi partai politik lebih fokus pada tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi biasanya lebih terperinci serta menunjukkan komitmen partai dalam menjalankan peranannya di dalam pemerintahan atau masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas negara, atau memperjuangkan hak-hak rakyat.

Adapun misi partai berkarya adalah:

- a. Mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang yang berorientasi pada stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- d. Membangun karakter bangsa, tata kelola pemerintahan dan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermartabat, berkeadilan, berkesetaraan, aman, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam

secara tepat guna dan berdaya guna serta berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemaritiman (Partai Berkarya, 2017).

Dari misi-misi partai berkarya, pada misi pertama menegaskan komitmen partai berkarya terhadap keutuhan NKRI dan kedaulatan negara, yang merupakan prinsip dasar negara Indonesia. Penekanan pada Pancasila dan UUD 1945 menunjukkan bahwa partai ini menganggap dasar negara dan konstitusi sebagai landasan yang tidak bisa diganggu gugat. Misi ini mencerminkan sikap nasionalisme yang kuat dan penghormatan terhadap ideologi serta hukum negara.

Misi kedua yaitu mengacu langsung pada pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar dari tujuan negara Indonesia. Partai ini berfokus pada tiga hal utama yaitu kesejahteraan umum, pendidikan, dan perdamaian dunia. Ini menunjukkan bahwa partai berkarya ingin menciptakan kondisi yang lebih baik secara sosial dan global, serta memastikan bahwa hak-hak rakyat dipenuhi dan bangsa Indonesia turut berperan aktif dalam dunia internasional dengan mengedepankan kemerdekaan dan perdamaian.

Misi ketiga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata. Dengan fokus pada stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi, partai ini berusaha memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan, yang mencakup distribusi kekayaan dan hasil pembangunan yang adil, menjadi fokus penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Misi keempat yaitu berfokus pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup pendidikan karakter, tata kelola pemerintahan yang baik, dan

penguatan demokrasi. Dalam misi ini, partai berkarya ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, bermartabat, dan berkeadilan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap moralitas sosial, keadilan, serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi kelima menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan mengutamakan demokrasi, partai ini ingin memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan integritas tinggi dan dapat dipercaya oleh rakyat. Penyediaan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mencerminkan tujuan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Misi keenam yaitu menunjukkan fokus pada perekonomian rakyat serta pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, partai ini berkomitmen untuk memastikan kemakmuran yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan pengembangan sektor kemaritiman, yang menunjukkan bahwa partai ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Selain visi dan misi partai berkarya juga menganut konsep trilogi pembangunan yang merupakan peninggalan rezim orde baru. Hal ini menjadi tidak aneh mengingat salah satu bahan untuk menarik empati masyarakat terhadap partai ini adalah mengangkat kebijakan serta keberhasilan rezim orde baru dan kerinduan pada sosok Soeharto, tidak luput pula anak-anak presiden kedua Indonesia tersebut turut menjadi kader partai

ini. Terdapat tiga nilai penting yang menjadi inti dari trilogi pembangunan tersebut yaitu (Fahri Abdillah, 2020):

- a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan menghidupkan kembali program-program pertanian.
- b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menekankan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

3.3 Struktur Kepengurusan Partai Beringin Karya

Organisasi kepengurusan partai berkarya terdiri dari tingkat pusat, (DPP) tingkat provinsi (DPW), tingkat kabupaten/kota (DPD), struktur organisasi di tingkat kecamatan (DPC), tingkat kelurahan/desa (DPAC) serta tingkat RT dan tingkat RW (DPRT). Kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RW dan RT disusun dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (Partai Berkarya, 2017). Struktur organisasi partai berkarya yang mencakup berbagai tingkatan (DPP hingga DPRT) ini menunjukkan upaya untuk membangun jaringan yang tersusun dan terorganisir dalam menjangkau semua lapisan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan. Penekanan pada keterwakilan perempuan sebesar 30% di setiap tingkatan menunjukkan bahwa partai ini berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam organisasi. Langkah ini tidak hanya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam berpolitik, tetapi juga memperkaya perspektif dan keputusan partai dalam mewujudkan keberagaman dalam politik Indonesia.

3.3.1 Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2020–2025

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-17. AH. 11. 01 terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dewan kohormatan, dewan pakar, mahkamah partai dan badan pengurus harian sebagaimana terlampir.

3.3.2 Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah

Terdapat 38 dewan pimpinan wilayah partai berkarya di seluruh Indonesia yang salah satunya berada di provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa partai berkarya memiliki struktur yang tersebar di banyak wilayah Indonesia, memberikan gambaran tentang tingkat organisasi yang cukup luas dan terdesentralisasi. Setiap dewan pimpinan wilayah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan partai di tingkat provinsi, yang memungkinkan partai untuk menjangkau banyak daerah dan merespons kebutuhan lokal. Saat ini tercatat jumlah anggota partai berkarya di provinsi Sumatera Barat sebanyak 9.307 anggota, angka ini memberikan gambaran tentang seberapa besar dukungan yang diterima oleh partai tersebut di provinsi Sumatera Barat. Dengan lebih dari sembilan ribu anggota, menunjukkan bahwa partai berkarya memiliki basis untuk meningkatkan jumlah anggota dan pemilih di masa depan.

Adapun struktur kepengurusan dewan pimpinan wilayah (DPW) partai berkarya provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Nomor 03.A/SK/DPP/BERKARYA/III/2023 adalah:

Tabel 3.1

Struktur Kepengurusan DPW Partai Berkarya Sumatera Barat

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Nila Sari Pramuharny
2.	Sekretaris	Berasal
3.	Bendahara	Resmita

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

3.3.3 Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah

Dewan pimpinan daerah partai berkarya adalah struktur kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan strategi politik di daerah, terutama dalam menjalankan program-program partai di tingkat lokal.

Berdasarkan SK No. 001.SK-DPD. PDG/DPW. SUMBAR/BERKARYA/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, kepengurusan partai berkarya Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 3.2
Struktur Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kota Padang

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Resmita
2.	Sekretaris	Yunizal, S.H
3.	Bendahara	Widya Syahdinan

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

3.4 Dinamika Partai Beringin Karya

3.4.1 Pengertian Dinamika

Dinamika menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerak dari dalam, tenaga menggerakkan ataupun semangat. Secara terminologi menurut Nandang Rusmana sebagaimana di kutip oleh sari mengatakan kata dinamika berasal dari kata *dynamics* (yunani) yang bermakna “kekuatan” (*force*). “*Dynamics is facts or concepts with refer to conditions of change, expecially to forces*”(dinamika adalah fakta atau konsep yang merujuk pada kondisi perubahan, khususnya kekuatan) (Sari 2019, 29). Menurut Dwiyanto dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung

mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas (Dwiyanto 2002, 110).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dinamika partai politik adalah sebuah kondisi yang terjadi pada partai politik sehingga menimbulkan sebuah interaksi atau hubungan timbal balik yang menyebabkan perubahan terhadap partai politik tersebut. Memahami dinamika politik adalah memahami tentang perubahan dan masalah terkait kebijakan serta bagaimana perubahan dan keputusan dalam kebijakan di dalam sebuah proses politik yang mana erat kaitannya dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh partai politik dalam menjawab tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Proses ini melibatkan adaptasi dan evolusi partai untuk tetap relevan dalam sistem politik.

3.4.2 Asas Partai Beringin Karya

Dinamika partai berkarya mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan perubahan dalam partai. Partai berkarya yang berasaskan Pancasila dengan ciri religius, kebangsaan, kerakyatan dan bersifat terbuka bagi seluruh warga negara republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan gender (Ad Partai Berkarya, 6). Ini menunjukkan bahwa partai ini ingin menjalankan ajaran dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu keadilan sosial, kebersamaan, dan persatuan serta terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan gender. Ini mengindikasikan partai yang ingin menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia.

3.4.3 Keikutsertaan Partai Beringin Karya dalam Pemilihan Umum

Partai beringin karya merupakan salah satu partai pendatang baru di arena pemilu 2019. Partai berkarya berdiri pada tanggal 15 Juli 2016 yang artinya partai berkarya baru pertama kali ikut dalam pemilu di tahun 2019. Partai berkarya memiliki visi dan misi yang menggambarkan tujuan dan cita-cita partai berkarya. Partai ini merupakan suatu partai yang terbentuk atas dasar adanya gagasan untuk memiliki kesadaran politik sendiri. Partai berkarya sebagai partai yang masih baru memerlukan strategi dalam menyusun kekuatan politik. Hal ini sebagai upaya persaingan melawan partai yang sudah sejak lama terbentuk yang artinya partai tersebut sudah terorganisir dengan baik. partai berkarya memerlukan upaya untuk mencapai pelembagaan partai agar dapat berkembang dan mampu terorganisir baik itu ditingkat nasional maupun di daerah (Siswanto, 2016).

Komisi Pemilihan Umum menetapkan partai berkarya sebagai satu dari 4 partai baru atau satu dari 16 partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum legislatif 2019. Sebagai partai muda untuk menarik perhatian masyarakat partai berkarya menetapkan fokus kegiatan pengabdian dan perjuangan politik yang menjadi isu nasional terkini. Untuk mensosialisasikan partainya, partai beringin karya berusaha memanfaatkan berbagai media sebagai tempat untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Publisitas yang dilakukan partai berkarya seringkali menampilkan sosok Soeharto sebagai simbol pemimpin ideal di masanya. Profil partai berkarya ditampilkan berkaitan dengan keluarga cendana, dengan mempublikasikan program strategis seperti meningkatkan sektor kesenian, kesehatan, pertanian, teknologi dan pembangunan terutama generasi muda serta

strategi menuju pilpres dan pilleg tahun 2019 (Asmara, Butsi 2022, 97).

Pada pemilu 2019 partai berkarya mendapatkan 2.902.495 suara (2,09 persen), perolehan suara partai berkarya itu tidak memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dewan perwakilan rakyat, tetapi ada 10 kader partai berkarya yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilu periode 2019 (Putranto, 2022).

3.4.4 Konflik Internal Partai Beringin Karya

Sesudah pemilihan umum tahun 2019 terjadilah konflik partai beringin karya. Konflik tersebut melibatkan dua subjek utama yaitu faksi Tommy Soeharto dan faksi Muchdi Purwopranjono yang menyebabkan perpecahan dan berdampak pada elektabilitas partai berkarya (Embu, 2020). Penyebab dari konflik ini adalah munculnya kekecewaan pada kader partai berkarya dalam hal ini yang tergabung dalam faksi Muchdi Purwopranjono terhadap kinerja kepengurusan DPP partai berkarya di bawah kepemimpinan ketua umum Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso dan tidak dilaksanakannya evaluasi partai dalam menanggapi buruknya kinerja partai berkarya pada perhelatan pemilu tahun 2019 (Ridwanata 2021, 81).

Dualisme kepengurusan di partai beringin karya berlanjut ketika Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pengesahan perubahan susunan pengurus DPP partai berkarya 2020-2025. Dalam surat itu kemenkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muchdi Purwopranjono. Namun, Tomy Soeharto tak terima partai berkarya di bawah kepengurusan Muchdi Purwopranjono, kemudian Tommy Soeharto menggugat putusan

itu ke PTUN Jakarta dan gugatannya dikabulkan pada 16 februari 2021 (Putranto, 2022).

Muchdi Purwopranjono juga tidak terima partai berkarya di bawah kepengurusan Tommy Soeharto lalu mengajukan banding, dalam putusannya 1 September 2021 majelis hakim PT PTUN Jakarta tetap menyatakan kepengurusan partai berkarya di bawah kepengurusan Tommy Soeharto yang merupakan kepengurusan yang sah. Kemudian Kemenkumham dan Muchdi Purwopranjo melanjutkan proses peradilan ke tingkat kasasi hingga akhirnya menang dalam proses kasasi di mahkamah agung pada 22 Maret 2022 dengan nomor putusan 182/G/2022/PTUN.JKT. (Putranto, 2022).

3.4.5 Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partai Beringin Karya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bertujuan untuk mengetahui legitimasi partai politik secara hukum dan partai politik sebagai calon peserta pemilu. Verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu bertujuan memastikan bahwa partai-partai politik memenuhi syarat dan kriteria yang di tentukan untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022. Verifikasi administrasi yaitu dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, sedangkan verifikasi faktual yaitu dilakukan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Pada verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum republik Indonesia, partai beringin karya tidak lolos verifikasi administrasi, dikarenakan masalah terlambat menyampaikan data persyaratan dan kurang lengkapnya dokumen persyaratan yang diajukan. Penyebabnya adalah konflik berkepanjangan di internal partai yang menjadi sebab faktor kegagalan tersebut. Partai beringin karya memastikan tidak mengikuti pemilihan umum 2024. Solusi yang di tawarkan untuk ikut pemilihan umum 2024 adalah bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut pemilihan umum dan membebaskan kadernya bergabung kepartai lain tanpa ada paksaan dan intimidasi apapun (TimdetikNews, 2022).

Dapat disimpulkan perjalanan partai beringin karya yang merupakan partai baru yang berusaha untuk memperkenalkan dirinya di panggung politik Indonesia, menghadapi berbagai tantangan, baik eksternal maupun internal. Meskipun berusaha untuk memperkenalkan visi dan misi melalui media dan pemanfaatan sosok Soeharto, partai ini gagal memenuhi ambang batas parlemen pada pemilihan umum 2019 dan mengalami konflik internal yang cukup serius antara dua faksi besar. Konflik tersebut mengarah pada ketidakstabilan kepemimpinan dan gangguan pada verifikasi administrasi untuk pemilihan umum 2024. Selain itu, perpecahan internal dan masalah administratif menjadi faktor penyebab utama kegagalan partai dalam bertahan dan bersaing dengan partai-partai yang lebih besar lainnya.